



SCBL, Langkah Nyata Menuju *World Class Institution*

Pembangunan Penguatan Kapasitas Institusi Lemhannas RI atau *Strengthening Capacity Building of Lemhannas RI (SCBL)* resmi ditutup pada 31 Oktober 2012. Kegiatan yang ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Spanyol, H.E. Rafael Conde de Saro, Atase Perdagangan Spanyol Antonio Estevez, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, serta para pejabat Lemhannas lainnya.

Kegiatan tersebut telah diawali sejak 1 Maret 2011, dalam hal ini Lemhannas RI telah merealisasikan kerjasama dengan CIMSA IGEIA, SA, dari Spanyol.

Kerjasama ini telah memberi manfaat, baik dari aspek administrasi perkantoran maupun dalam proses pendidikan calon pimpinan tingkat nasional.

Selain mencakup infrastruktur dan aplikasi, kerjasama dengan CIMSA IGEIA, SA juga mencakup aspek pelatihan dan sosialisasi dalam satu paket.

"Pencapaian prestasi Lemhannas RI yang semakin meningkat, mengantarkan lembaga ini pada tekad

mewujudkan keinginan Presiden RI agar Lemhannas RI menjadi institusi berkelas dunia atau *World Class Institution*," kata Gubernur Lemhannas RI pada amanatnya.

Penguatan Pembangunan Kapasitas Institusi Lemhannas RI (*Strengthening the Capacity Building of Lemhannas RI - SCBL*) merupakan langkah signifikan sebagai upaya menuju lembaga berkelas dunia.

"Penguatan pembangunan kapasitas institusi tentu membutuhkan penerapan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta sarana untuk membuka diri kepada dunia melalui *platform* yang solid dan aman, agar dapat bekerjasama dengan para *stakeholders* melalui pertukaran data dan pengetahuan," Gubernur Lemhannas RI menambahkan.

Saat ini, kerjasama Lemhannas RI dan CIMSA telah memasuki tahap masa pemeliharaan, yang berlangsung selama dua tahun kedepan. "Hal ini tidak hanya penting dalam memantapkan operasional sistem, tetapi juga dalam memastikan terjadinya alih teknologi, sehingga sistem dapat dijaga dan dijalankan lebih lanjut," kata Gubernur Lemhannas RI.

Redaksi :

Pengarah :

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Redaktur :

Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :

Kolonel Laut (P) Estu Prabowo,

Letkol Caj G.T. Situmorang.

Redaktur Pelaksana :

Bambang Iman Aryanto, S.T., Trias

Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos.

Desain Grafis & Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, , Lettu Cba Supriyono, Suryadi.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI,

Jl.Medan Merdeka Selatan No. 10

Jakarta Pusat, 10110, Telp. (021)

3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

DaftarIsi:

- 1 **SCBL, Langkah Nyata Menuju *World Class Institution***
- 2 **Generasi Muda, Jangan Lupakan Sejarah**
- 3 **Nilai-nilai Kebangsaan sebagai Nilai Tambah dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi**
- 4 **Rapat Dengar Pendapat Lemhannas RI - Komisi DPR RI**
- 5 **Workshop Lemhannas RI - Nuffic**
- 6 ***Roundtable Discussion* Pemahaman Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika**
- 7 **Diskusi Eksternal Bersama HS. Dillon**
- 8 **Pengusaha Perkuat Wawasan Kebangsaan**
- 9 **Nilai-nilai Kebangsaan sebagai Sumber Nilai dalam rangka Pembuatan Perda**
- 10 **PPRA XLVII dan PPSA XVII Lakukan Studi Strategis Luar Negeri**
- 12 **Wilayah Perbatasan, Beranda terdepan yang Mencerminkan NKRI**



Foto : Humas Lemhannas

Palembang- Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Moeldoko memberikan pemahaman wawasan kebangsaan sekaligus memberikan motivasi kepada generasi muda.

"Generasi muda adalah agen perubahan, maka harus paham dan

Generasi Muda Jangan Lupakan Sejarah

jangan melupakan sejarah," katanya saat memberikan kuliah perdana dihadapan 2.210 mahasiswa baru Universitas Mahasiswa Palembang (UMP), Kamis (6/9).

Dikatakannya, perkembangan generasi muda saat ini dinilai masih dalam tahap kewajaran. "Beragam bentuk pola perubahan yang terjadi pada mahasiswa dan generasi muda, masih dapat dikatakan wajar, selagi mereka bisa memahami konsep wawasan kebangsaan dan menghargai sejarah bangsa itu sendiri," ungkapnya.

Rektor UMP HM Idris SE, M.Si mengatakan kehadiran

Wakil Gubernur Lemhannas RI untuk memberikan pemahaman konsep wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru. "Kami memang sengaja dari awal berniat menghadirkan Lemhannas RI di Ospek tahun ini," jelasnya.

Idris menjelaskan, betapa pentingnya nilai-nilai wawasan kebangsaan itu sendiri bagi anak didiknya. "Paling tidak ini adalah bekal awal mereka sebelum mendapatkan mata pelajaran di kuliah nantinya. Hal ini sendiri kami nilai sangat penting untuk mahasiswa, pungkasnya. (Sumatera Ekspres-7 Sept 2012, hal. 10)





Foto : Humas Lemhannas

Nilai-nilai Kebangsaan sebagai Nilai Tambah dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

Lemhannas RI bekerja sama dengan BP Migas menyelenggarakan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi BP Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Pemangku Kepentingan BP Migas di Lemhannas RI, Jakarta.

Senin, (3/9), Upacara Pembukaan tersebut diresmikan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Selain para pejabat internal Lemhannas RI, hadir pula para pejabat dari BP Migas beserta jajarannya.

Kegiatan Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan yang berlangsung

selama sepekan ini dapat memberi nilai tambah yang sangat berarti bagi para peserta dalam pandangan dan wawasannya tentang nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) Konsensus dasar bangsa.

“Hasil pengelolaan Migas di Indonesia memainkan peranan penting dalam proses pembangunan di Indonesia, oleh karenanya industri Migas disebut merupakan industri strategis,” ucap Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya.

Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan ini adalah merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi.

Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan ini sendiri bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman secara dialogis untuk berfikir komprehensif, integral,

holistik dan sistemik dalam kerangka kepentingan nasional.

Dari kegiatan pemantapan yang singkat ini, Gubernur Lemhannas RI berharap agar para peserta bersungguh-sungguh dalam mengikutinya.

Dengan demikian, manfaat yang dicapai dari kegiatan ini akan optimal dan maksimal sebagai upaya untuk memperkuat sendi-sendi kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu juga dapat sekaligus sebagai pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing peserta sebagai garda terdepan dalam bidang pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Rapat Dengar Pendapat Lemhannas RI – Komisi I DPR RI

Selasa, (11/9), Lemhannas RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Jakarta. Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA membacakan penjelasan tertulisnya didampingi Wakil Gubernur, Sekretaris Utama dan beberapa pejabat struktural lainnya.

Kehadiran Lemhannas RI pada RDP dengan Komisi I DPR RI tersebut membahas program kegiatan Lemhannas RI tahun anggaran 2012.

“berdasarkan penelaahan Pagu sementara antara Lemhannas RI dengan kementerian Keuangan, masih terdapat kegiatan prioritas di bidang ketahanan nasional yang belum terdukung,” ungkap Gubernur Lemhannas RI saat mengawali penjelasannya.

“sehingga perlu dilakukan perubahan alokasi anggaran yang mencakup: **pertama**, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; **kedua**, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur

negara; **ketiga**, program pengembangan ketahanan nasional,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Lemhannas RI pada RDP tersebut mengusulkan kembali anggaran kegiatan yang belum terdukung dalam RKA-KL TA 2013.

Selain itu, Gubernur Lemhannas RI juga melaporkan tentang penekanan Komisi I DPR RI terhadap status tanah Lemhannas RI pada RDP sebelumnya. Lemhannas RI telah berupaya memenuhi seluruh persyaratan hukum bagi terbitnya sertifikat tanah tersebut.

“Dalam rangka rencana peningkatan sarana dan prasarana, diperlukan persiapan dukungan anggaran yang belum dapat diperkirakan besarnya”, jelas Gubernur Lemhannas RI.

Dengan adanya sinergi berkelanjutan yang melandasi RDP yang dilaksanakan ini, Gubernur Lemhannas RI berharap sinergi seperti ini akan selalu terjalin demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Workshop Lemhannas RI dan Nuffic



Foto : Humas Lemhannas

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji membuka Workshop Lemhannas RI dalam Program Niche - Nuffic pada acara *Capacity Building in International Topics in Education and Studies at Lemhannas RI* pada 11 - 12 September 2012 bertempat di Ruang Sumba D-Hotel Borobudur, Jakarta .

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa tujuan Lemhannas RI untuk menjadi *World Class Institution* juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, maka Lemhannas RI menerima tawaran dari NUFFIC Netherland dalam Program *Netherland Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE)*.

Adapun tujuan umum dari program tersebut adalah memperbaiki tata kelola dengan cara meningkatkan kinerja Lemhannas RI dalam bidang pendidikan dan pengkajian.

Sedangkan tujuan khususnya adalah bagaimana meningkatkan manajemen dan kapasistas Lemhannas RI dalam membahas permasalahan pendidikan dan pengkajian, serta pengarusutamaan isu gender agar

relevan dengan perubahan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

"Untuk menjadikan Lemhannas RI sebagai lembaga berkelas dunia, hal pertama yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia," kata Budi Susilo Soepandji.

Dengan demikian, Gubernur Lemhannas RI mengharapkan dari program tersebut kapasitas SDM Lemhannas RI khususnya para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, juga staf manajemen Lemhannas RI akan semakin meningkat untuk memperbaharui dan membuat inovasi, khususnya isu internasional seperti demokrasi, hak asasi manusia, globalisasi, tata kelola pemerintahan yang baik, isu lingkungan dan perubahan iklim, pengetahuan dan teknologi informasi, hubungan internasional, keamanan pangan dan energi, pengarusutamaan gender, dsb. sehingga dapat merespon berbagai perubahan dan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

Roundtable Discussion tentang Pemahaman Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. memberikan sambutannya pada *Roundtable Discussion* mengenai "Pemahaman Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika di Dua Belas Provinsi" pada 12 September 2012 di Gedung Astagatra Lt. III Barat, Lemhannas RI .

Saat ini, Indonesia dihadapkan dengan tergerusnya tingkat pemahaman, sikap, dan implementasi nilai-nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh kuatnya arus globalisasi maupun konflik horizontal.

Dalam RTD tersebut, para peserta merumuskan pokok bahasan tentang nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika antara lain berupa toleransi, gotong-royong, dan keadilan.

"Nilai-nilai ini diharapkan menjadi solusi yang tepat, guna mengatasi berbagai persoalan bangsa, terutama berkaitan dengan nilai kebangsaan seperti disintegrasi bangsa," kata Gubernur Lemhannas RI saat memberikan sambutan di hadapan para narasumber, penanggap, peneliti, dan para pejabat Lemhannas RI.

"Kita mengetahui bersama, hampir setiap hari terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang menimbulkan kerugian besar, baik berupa material maupun korban jiwa," kata Gubernur, "Untuk itu besar harapan bahwa hasil kegiatan ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan bangsa."



Foto : Humas Lemhannas



Foto : Humas Lemhannas



Foto : Humas Lemhannas





Foto : Humas Lemhannas

Diskusi Eksternal Bersama HS Dillon

Pada acara Diskusi Eksternal Dewan Pengarah di Ruang Rapat Dewan Pengarah Lemhannas RI, Jakarta pada hari Kamis, (13/9), HS. Dillon menyatakan bahwa kita perlu mereformasi tata kelola (*Governance*), Revitalisasi Pertanian, Meningkatkan efektivitas program berjalan-penataan and monev, dan siap mewakafkan diri untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat.

Diskusi Eksternal yang dibuka oleh Koordinator Dewan Pengarah yang juga sebagai Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengangkat topik tentang Penanggulangan Kemiskinan guna Peningkatan Kemandirian dalam rangka Ketahanan Nasional.

Dalam paparannya, HS Dillon mengungkapkan apa yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah perkembangan teknologi, globalisasi, dan kebijakan pro pasar yang merupakan penggerak pertumbuhan ternyata dapat memperlebar

kesenjangan antara kaya dan miskin.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. Sedangkan hasil dari Labkurtannas Lemhannas RI yang berdasarkan data dari 33 Provinsi di Indonesia, saat ini penanggulangan kemiskinan menempati peringkat pertama dalam memperkokoh ketahanan nasional.

Dari hasil diskusi yang diselenggarakan ini, diharapkan dapat menghasilkan masukan, saran untuk pemecahan masalah

dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, secara komprehensif integral dan holistik, dengan memperhatikan tuntutan kondisi dan tantangan dinamika perkembangan aktual lingkungan strategis nasional, regional maupun global.

Diskusi ini dihadiri oleh para anggota Dewan Pengarah, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Utama, para Deputi, Inspektur, para Wakor Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional.



Foto : Humas Lemhannas

Pengusaha Perkuat Wawasan Kebangsaan

“kehadiran saudara – saudara di Lemhannas RI, sungguh perlu di-apresiasi karena di tengah – tengah kesibukan dunia usaha yang saudara geluti, saudara– saudara telah meluangkan waktu untuk berdiskusi serta berdialog memperluas dan memperkuat wawasan kebangsaan kita semua”.

Hal tersebut diungkapkan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA selaku Gubernur Lemhannas RI saat memberikan sambutan pada Pembukaan Dialog Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi kalangan Pengusaha pada hari Jumat (14/9), di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta.

Dengan pengaruh globalisasi saat ini, Hubungan antarbangsa telah berkembang kepada saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, selain itu trend ancaman terhadap kedaulatan suatu negara, telah mengalami pergeseran dari ancaman yang bersifat fisik menjadi bersifat non fisik, termasuk di dalamnya ancaman terhadap kedaulatan ekonomi.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, perdagangan bebas dan persaingan global, harus mampu diantisipasi dan disikapi secara bijak dan cerdas tanpa harus meninggalkan rasa nasionalisme dan mengorbankan kepentingan bangsa.

Oleh karena itu, sebagai salah satu tiang penyangga dan motor penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi bangsa, kalangan dunia usaha diharapkan mampu memilih dan memilah berbagai tantangan dan peluang usaha yang terbuka lebar, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Kembali ditegaskan oleh Gubernur Lemhannas RI bahwa seluruh komponen bangsa dalam susunan supra



struktur, infra struktur dan sub struktur politik, termasuk kalangan pengusaha di dalamnya, harus mampu membangun kembali komunikasi politik yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dalam berbagai aspeknya.

Oleh karena itu, perlu disikapi secara bersama sebagai satu kesatuan entitas bangsa. Perbedaan suku, agama, ras dan golongan harus mampu dikelola menjadi satu kekuatan dan keunggulan kompetitif bangsa.

Melalui dialog wawasan kebangsaan yang berlangsung selama tiga hari sampai hari minggu (16/9), Gubernur Lemhannas RI berharap kepada seluruh peserta dialog agar mampu mengambil inti sari dialog dan memetik manfaat untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan perannya sebagai pelaku dunia usaha yang nasionalis.

Upacara pembukaan tersebut, dihadiri pula oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputy, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional serta undangan lainnya.



Nilai-nilai Kebangsaan Sebagai Sumber Nilai dalam rangka Pembuatan Perda



Foto : Humas Lemhannas

Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan kembali diselenggarakan, kali ini bagi Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Kegiatan tersebut dibuka oleh Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA selaku Gubernur Lemhannas RI pada hari Senin, (17/9), di Gedung Trigatra Lt. III Timur Lemhannas RI, Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI melihat tema yang di usung dalam kegiatan ini "Nilai-nilai Kebangsaan sebagai Sumber Nilai dalam rangka Pembuatan Peraturan Daerah" memandang penting dan relevan. Hal ini mengingat masih ada peraturan-peraturan daerah yang memerlukan revisi dan perubahan dalam hal substansi materi.

Oleh karena hal itu, jangan sampai proses demokrasi yang sedang dijalani, justru akan melemahkan nilai dan jati diri bangsa yang bercirikan semangat kegotongroyongan.

Dengan kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini diharapkan akan dapat membekali peserta dengan

materi-materi yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, yaitu : Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini peserta dapat berpikir komprehensif Integral untuk kepentingan Nasional dalam kerangka NKRI, bersikap antisipatif, kooperatif, dan Sinergik terhadap kepentingan rakyat, berkepedulian terhadap potensi yang dimiliki daerah dan menumbuhkembangkan kemandirian daerah, berkomitmen terhadap kelangsungan pembangunan nasional yang dapat menjamin ketenteraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kegiatan yang singkat ini juga merupakan ajang tukar pikiran dan pengalaman guna memperluas jejaring kerja antar peserta dalam rangka mensinergikan proses pembangunan di daerah masing-masing, tanpa melupakan bahwa daerah merupakan sub-sistem nasional, baik struktural maupun fungsional.



PPRA XLVII dan PPSA XVIII Lakukan Studi Strategis Luar Negeri

mengkaji hal-hal yang menjadi gambaran kondisi wilayah yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dalam perspektif ketahanan nasional.

Kunjungan SSLN yang dilaksanakan di setiap negara tujuan, berpedoman pada tema pendidikan dan tema seminar bagi Program Pendidikan, baik PPRA XLVII maupun PPSA XVII Lemhannas RI.

Untuk PPRA XLVII mengangkat tema tentang "Pendidikan Politik dalam rangka Ketahanan Nasional" sedangkan untuk tema seminar yang diusung adalah "Peningkatan Etika Politik dalam rangka Ketahanan Nasional"

Sedangkan tema pendidikan PPSA XVII yaitu "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Keutuhan NKRI," dan tema seminar tentang "Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Keutuhan NKRI".

Dengan kesempatan yang dimiliki pada SSLN tersebut, para peserta diharapkan dapat bersungguh-sungguh untuk melakukan studi strategis ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab agar bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang cemerlang dan konstruktif bagi Lemhannas RI dan Indonesia.

Para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII Lemhannas RI Tahun 2012 melakukan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) di bulan september 2012.

PPRA XLVII Lemhannas RI melakukan SSLN sejak tanggal 2 September sampai dengan 7 September 2012 dengan empat negara tujuan, yakni Selandia Baru, Thailand, China, dan Filipina.

Sedangkan untuk PPSA XVII Lemhannas RI melakukan SSLN sejak tanggal 17 September sampai dengan 21 September 2012 dengan tiga negara tujuan, yakni India, Jepang, dan Australia.

SSLN yang merupakan salah satu kegiatan utama dalam program pendidikan di Lemhannas RI, bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para peserta PPSA XVII untuk mengenal dan melihat secara langsung tentang strategi, pola dan system pembangunan nasional dari negara tujuan, untuk digunakan sebagai pembandingan terhadap Ketahanan Nasional Indonesia.

Melalui program kegiatan SSLN ini, para peserta memiliki kesempatan untuk mempelajari, memahami dan

Selandia Baru: Pendekatan Kreatif Untuk Dekati Generasi Muda

Pernyataan ini disampaikan oleh Pendiri dan CEO McGuinnes Institute, Wendy McGuinnes, ketika menerima rombongan PPRA XLVII Lemhannas RI yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dalam rangka kunjungan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) di McGuinnes Institute, Wellington, Selandia Baru pada Selasa (4/9/2012).

"Berdasarkan yang kami pelajari dari negara lain seperti Korea dan Kanada, memang sulit untuk membuat kaum muda tetap tertarik dengan persoalan masa depan. Dari pengalaman kami didapati kenyataan bahwa generasi





Foto : Humas Lemhannas

muda merasa suara mereka tidak didengarkan, dan untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan pendekatan kreatif, serta diperkenalkannya metode "pay it forward", yaitu suatu metode di mana para generasi muda yang sudah diikuti dalam lokakarya tentang permasalahan konstitusi akan membagikan wawasan baru yang mereka peroleh ke orang lain dan mengajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk terlibat dalam proses *review* konstitusi.

Selandia Baru merupakan salah satu negara di abad ini yang mengundang warganya untuk melakukan *review* terhadap konstitusi negara.

Perwakilan generasi muda dari seluruh Selandia Baru dan dari berbagai latar belakang berkumpul di Parlemen untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masa depan konstitusi Selandia Baru sebagai bagian dari proses perancangan konstitusi.

McGuinness Institute sendiri merupakan lembaga *think-tank* non-partisan berbasis di Wellington yang

dikenal dengan proyek *Constitutional Review* dan *Project 2058*.

Keesokan harinya, Rabu, (5/9), rombongan SSLN PPRA 47, dengan dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, bertolak menuju Wairakei Geothermal Research Center di Taupo untuk berdiskusi tentang teknologi eksplorasi dan utilisasi energi geotermal dan kemungkinan kerja sama lebih lanjut kedua negara di bidang tersebut.

Kunjungan dilanjutkan pada hari yang sama ke Wairakei Geothermal Power Plant untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait utilisasi energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik.

Pada Kamis (6/9), dengan didampingi oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc., rombongan PPRA XLVII Lemhannas RI melakukan kunjungan ke Fonterra Co-operative Group Limited yang berbasis di Auckland.

Di sini para peserta melakukan diskusi dan tanya jawab secara antusias dengan pihak Fonterra terkait antara lain mengenai sejarah Fonterra sebagai koperasi peternak susu yang tumbuh menjadi perusahaan sukses berskala global.

Selain itu juga turut dibahas rencana Fonterra ke depan pasca ditetapkannya keputusan investasi NZ\$ 20 juta untuk pembangunan pabrik di Indonesia dan adanya inisiatif Fonterra sebagai perusahaan besar yang peduli terhadap lingkungan.



Foto : Humas Lemhannas

Wilayah Perbatasan, Beranda Terdepan Yang Mencerminkan NKRI

Tim Survey Ditjian Hankam Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Perbatasan tepatnya di daerah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Kunjungan yang dilakukan Tim survey Ditjian Hankam adalah dalam rangka melakukan program kajian berlanjut yang berjudul "Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI".

Tim Survey yang berjumlah 12 orang diantaranya termasuk Deputy Pengkajian Strategik dan Direktur Pengkajian bidang Pertahanan dan Keamanan, selain mengumpulkan data dan informasi, juga melakukan beberapa kegiatan diantaranya melakukan kunjungan ke Istana Setia Negara yang berada di Kabupaten Sanggau, berkunjung ke Kantor Bupati Sanggau untuk bertemu dengan Bupati Sanggau yang turut dihadiri oleh Muspida setempat, dan melakukan kunjungan ke Desa Dusun Pala Pasang.



Foto : Debidjian Lemhannas

Selain itu Tim Survey tersebut juga melakukan kunjungan dan pertemuan dengan panglima Kodam XII Tanjung Pura Pontianak dan unsur Muspida untuk melakukan tanya-jawab.

Kawasan perbatasan memiliki peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Sementara itu dalam perkembangannya, kawasan perbatasan ini memiliki peran sebagai beranda terdepan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional.

Apalagi kedudukan yang sangat strategis, menjadikan pengembangan kawasan perbatasan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Masalah perbatasan bagi Indonesia menjadi sesuatu masalah yang cukup krusial, apalagi jika dilihat dari luas wilayah perbatasan negara jika ditinjau dari sudut pandang teritorial NKRI.

Seperti halnya provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang mempunyai perbatasan langsung, baik itu darat maupun laut dengan negeri jiran Malaysia.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pengembangan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi sesuatu hal yang sangat penting.

Jika selama ini perbatasan selalu dianggap sebagai wilayah belakang NKRI. Namun untuk mengangkat citra negara, wilayah perbatasan dalam paradigma pembangunan harus dijadikan beranda terdepan yang mencerminkan NKRI.



Foto : Debidjian Lemhannas